

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



KOMINFO

Senin, 26 Oktober 2020

1. Surat Permohonan Bantuan Dana Pengamanan Pelaksanaan Pilkada Mengatasnamakan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi



Penjelasan :

Telah beredar sebuah surat permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan pilkada 2020 yang mengatasnamakan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, surat tertanggal 20 Oktober 2020 itu ditujukan ke Pimpinan Direksi Perusahaan di Sumatera Utara. Di dalam surat tertulis Pemprov Sumut sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada. Namun, anggaran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani disebut tidak mencukupi sehingga butuh bantuan dari perusahaan.

Faktanya, dilansir melalui laman resmi Facebook Humas Sumut, Pemerintah Provinsi Sumut mengklarifikasi bahwa surat edaran tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayai dan menyebarluaskan surat edaran tersebut.

Hoaks

Link Counter:

<https://www.facebook.com/birohumasdankeprotokolan/posts/4565269493546214>

<https://news.detik.com/berita/d-5227743/pemprov-pastikan-surat-gubsu-minta-dana-pengamanan-pilkada-ke-perusahaan-hoax>

<https://turnbackhoax.id/2020/10/25/salah-surat-gubernur-sumatera-utara-minta-dana-pengamanan-pilkada-2020/>

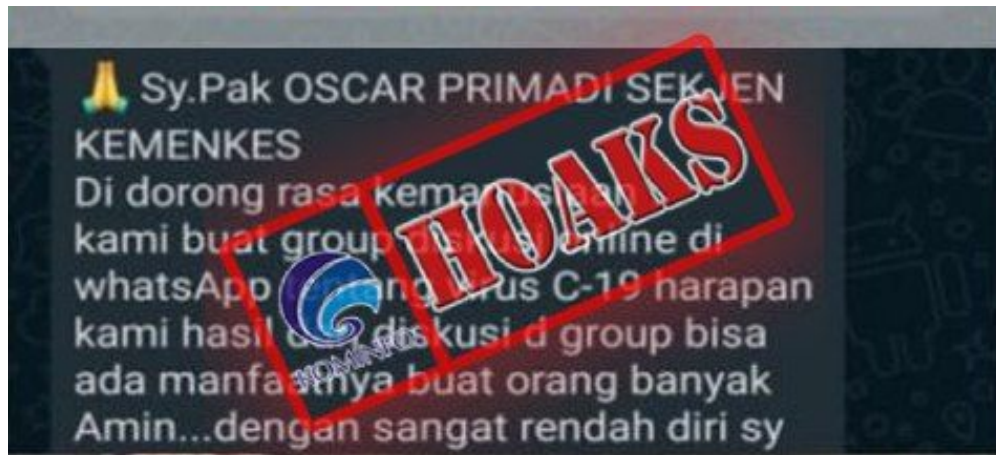
Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Senin, 26 Oktober 2020

2. Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Sekjen Kemenkes Oscar Primadi



Penjelasan :

Beredar informasi melalui grup Whatsapp yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH. Pesan tersebut berisi ajakan untuk bergabung dalam grup tertentu untuk berdiskusi tentang Virus C-19 atau Covid-19.

Setelah ditelusuri, diketahui pesan yang beredar tersebut adalah tidak benar dan merupakan tindak penipuan. Kementerian Kesehatan RI melalui laman Twitter resminya @KemenkesRI mengklarifikasi bahwa Sekjen Kemenkes RI, drg. Oscar Primadi, MPH tidak pernah membuat grup WhatsApp maupun menulis pesan mengajak bergabung dalam grup tertentu untuk berdiskusi tentang Virus C-19 atau Covid-19. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk mengabaikan apabila menerima pesan atau grup WhatsApp terkait Covid-19 yang mengatasnamakan "Oscar Primadi".

Hoaks

Link Counter:

<https://twitter.com/KemenkesRI/status/1320623932995735557>

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



KOMINFO

Senin, 26 Oktober 2020

3. Klaim Aliansi Dokter Dunia soal Covid-19



Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah video mengatasnamakan Aliansi Dokter Dunia yang mengklaim bahwa Virus Corona adalah virus flu biasa dan tidak ada pandemic Covid-19. Dalam video tersebut mereka mengatakan lockdown di seluruh dunia untuk mencegah Virus Corona harus diakhiri.

Faktanya, klaim tersebut tidak tepat. Para ilmuwan secara umum menyatakan penyebab pandemi saat ini adalah Virus Corona baru SARS-CoV-2 dan bukan jenis virus influenza. Sejauh ini Covid-19 telah membunuh lebih banyak orang dibanding lima flu musiman jika korbannya digabungkan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, Covid-19 menyebar lebih mudah daripada flu dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah. Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus menerangkan alasan Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global, yakni tingkat penyebaran penyakit dan dampaknya yang sangat mengkhawatirkan. Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito ikut angkat bicara menanggapi video ini. Prof Wiku menegaskan pernyataan dalam video tersebut tidak benar. Prof Wiku menekankan, masyarakat harus mampu memilah mana informasi yang benar. Sumber informasi terpercaya antara lain seperti WHO, PBB, dan CDC. Sedangkan untuk Indonesia, bisa bersumber dari Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19.

Hoaks

Link Counter:

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/10/26/152925723/hoaks-klaim-aliansi-dokter-dunia-soal-covid-19-begini-faktanya?page=1>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5229833/viral-aliansi-dokter-dunia-ragukan-covid-19-apa-kata-satgas>

Senin, 26 Oktober 2020

4. Zombie adalah Nama Pahlawan Islam dari Brasil



Penjelasan :

Beredar sebuah poster di media sosial berisi klaim bahwa Zombie adalah nama pahlawan Islam dari Brasil. Dalam poster tersebut terdapat foto zombie yang biasa terlihat di film-film. Ada pula foto patung dengan nama Zumbi dos Palmares, yang di bawahnya terdapat teks "O Lider Negro de Todas as Racas".

Faktanya, dikutip dari [Cekfakta.tempo.co](https://cekfakta.tempo.co) klaim bahwa Zombie merupakan nama pahlawan Islam dari Brasil adalah keliru. Memang terdapat pemimpin perlawanan kulit hitam di Brasil yang bernama Zumbi dos Palmares. Namun, tidak ada bukti yang menyebutkan nama Zumbi berasal dari kata "zombie", termasuk bahwa Zumbi seorang Muslim. Menurut sejumlah sumber, kisah Zumbi tidak terkait dengan zombie maupun Islam. Zumbi adalah pemimpin komunitas Quilombo dos Palmares di Brasil yang memerangi praktik perbudakan. Ia juga lahir pada 1655, bertolak belakang dengan narasi dalam poster yang berbunyi "pada tahun 1643, dengan gagah berani, ia mendeklarasikan berdirinya Negara Islam di Brasil".

Hoaks

Link Counter:

<https://cekfakta.tempo.co/fakta/1074/fakta-atau-hoaks-benarkah-zombie-adalah-nama-pahlawan-islam-dari-brasil>

Senin, 26 Oktober 2020

5. Papua Resmi Memisahkan Diri dari NKRI



Penjelasan :

Telah beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi sebuah narasi bahwa Papua resmi memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Unggahan tersebut juga memuat sebuah video yang tampak seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Presiden Negara Federal Papua Barat. Unggahan tersebut dimuat pada Sabtu, 24 Oktober 2020.

Dilansir dari laman situs [Medcom.id](https://www.medcom.id), klaim bahwa Papua resmi memisahkan diri dari NKRI adalah salah. Faktanya tidak ada informasi resmi mengenai hal itu. Kelompok yang menamakan diri Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tidak pernah diakui Pemerintah RI. Dilansir dari Pasific Pos, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Yonas Alfons Nussy meminta masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi terkait dengan NRFPB tersebut. Yonas meminta NRFPB tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif.

Hoaks

Link Counter:

<https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA3xX2k-cek-fakta-papua-resmi-memisahkan-diri-da-ri-nkri-ini-faktanya>

<https://www.pasificpos.com/sekjend-bmp-ri-minta-masyarakat-papua-tidak-terprovokasi-dengan-imbauan-dari-pimpinan-negara-federal/>

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



KOMINFO

Senin, 26 Oktober 2020

6. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) : Masker Tidak Diperlukan karena Covid-19 Tidak Menyebar melalui Udara.



Penjelasan :

Beredar narasi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyatakan bahwa virus Covid-19 tidak pernah menyebar ke udara sehingga penggunaan masker tidak diperlukan.

Berdasarkan penelusuran, klaim Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyatakan bahwa virus Covid-19 tidak pernah menyebar ke udara sehingga penggunaan masker tidak diperlukan adalah keliru. CDC pada 18 September 2020 menulis di situs [CDC](#) bahwa ada kemungkinan Covid-19 dapat menyebar melalui tetesan dan partikel di udara yang terbentuk ketika pengidap Covid-19 batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, atau bernapas. CDC juga merekomendasikan penggunaan masker untuk menahan sebaran Covid-19 karena ada juga bukti yang berkembang bahwa tetesan dan partikel di udara dapat tetap melayang di udara dan dihirup orang lain. Sebelumnya, badan kesehatan dunia WHO pada 9 Juli 2020 menegaskan, salah satu cara penularan SARS-CoV-2 adalah transmisi udara. WHO menjelaskan, penularan melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran agen infeksius yang disebabkan sebaran droplet nuklei (aerosol) yang tetap menular saat melayang di udara dalam jarak dan waktu yang jauh.

Disinformasi

Link Counter:

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/26/142730765/hoaks-cdc-menyatakan-covid-19-tidak-menyebar-lewat-udara>

Senin, 26 Oktober 2020

7. Memakai Masker Tak Ber-SNI Bakal Didenda dan Dipenjara



Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial Facebook yang mengunggah tangkapan layar dari salah satu situs berita dengan judul "Tak Boleh Sembarangan, Pemerintah Mulai Hari Ini Anjurkan Pakai Masker Ber-SNI", dan tambahan narasi yang mengklaim jika memakai masker tak ber-SNI maka akan di denda dan di penjara.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyebut orang yang memakai masker tidak ber-SNI akan didenda dan dipenjara adalah tidak benar. Faktanya Kementerian Perindustrian melalui Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Elis Masitoh memberikan penjelasannya. Ia menegaskan penerapan SNI masker dari kain masih bersifat sukarela. "Kami sampaikan kembali bahwa tujuan penetapan SNI ini adalah sebagai pedoman bagi industri dalam negeri untuk memproduksi masker kain dengan spesifikasi atau parameter yang ada di dalam SNI 8914:2020 tersebut, sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19 dengan lebih baik dan lebih aman digunakan masyarakat," ujarnya.

Disinformasi

Link Counter:

<https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4391349/cek-fakta-tidak-benar-memakai-masker-tak-ber-sni-bakal-didenda-dan-dipenjara>